

LAPORAN KINERJA (LAKIN)

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDUNG TEGALLEGA TAHUN 2024



KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDUNG TEGALLEGA
JL.SOEKARNO HATTA NO. 216, BANDUNG
TELEPON (021) 6030566 FAX (022) 6012575

Januari 2025

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun laporan kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi, dan tujuan organisasi.

Sebagai tindak lanjut peraturan presiden tersebut, diterbitkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega Tahun 2024 ini merupakan perwujudan dari tanggung jawab atas keberhasilan serta kegagalan pencapaian visi dan misi yang diemban kantor kami.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega diharapkan dapat memberikan informasi secara lengkap dan jelas bagi semua pihak yang berkepentingan, sekaligus dapat memberikan motivasi serta meningkatkan budaya kerja secara lebih efektif dan efisien bagi seluruh aparat di jajaran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.

Demikian, untuk menjadikan maklum.

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Dadang Karna Permana



BAB I

PENDAHULUAN

Sebagai bagian Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega mempunyai tugas mengumpulkan penerimaan pajak. Dalam tugas tersebut terkandung beberapa peran yang sangat strategis, yaitu:

- a. Mengamankan dan meningkatkan penerimaan negara dari pajak serta penerimaan negara bukan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri, yang berguna untuk membiayai pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan.
- b. Ikut serta memajukan pertumbuhan dunia usaha dan industri dalam negeri dengan jalan memberikan fasilitas kebijaksanaan fiskal, seperti memberikan kemudahan dalam rangka pengolahan bahan baku impor dan ekspor dan melakukan pencegahan serta pemberantasan penyelundupan.

Dalam kondisi perekonomian global yang belum sepenuhnya pulih dari krisis ekonomi yang berkepanjangan, pada tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega memikul tugas mengamankan target penerimaan pajak sebesar Rp. 2.794.827.553.000,-.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, seluruh jajaran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega telah sepakat untuk mewujudkan visi Direktorat Jenderal Pajak, yaitu:

“Menjadi institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang Terbaik demi Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara”

Selanjutnya dalam menjawab tantangan akan peran tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega dituntut untuk dapat selalu mengantisipasi berbagai tuntutan perkembangan, baik dari dalam maupun luar negeri, sebagai konsekuensi menjadi bagian komunitas masyarakat internasional.

Untuk mewujudkan pertanggungjawaban tersebut di atas, maka sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014, disusunlah Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega Tahun Anggaran 2023.

Adapun yang menjadi pertimbangan disusunnya Lakin adalah:

- a. Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun laporan kinerja (LAKIN) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi dan penggunaan anggaran.;
- b. Untuk dapat menyusun LAKIN, terlebih dahulu harus disusun Renstra;

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega Tahun 2023, diharapkan aparat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega dapat lebih terdorong dan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya. Dengan demikian, sasaran dan tujuan sebagaimana digariskan dalam visi dan misi yang dicapai. Selain itu, diharapkan pula berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan dapat dievaluasi, sehingga untuk pelaksanaan selanjutnya bisa berjalan lebih baik lagi.

1.1 LINGKUNGAN STRATEGIS

1.1.1 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega terdiri atas:

1. Kepala Kantor
2. Subbag Umum dan Kepatuhan Internal
3. Seksi Pelayanan
4. Seksi Pengawasan I, II, III, IV,V,VI
5. Seksi Penjamin Kualitas Data
6. Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan
7. Kelompok Jabatan Fungsional

1.1.2 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega untuk tahun 2024 baik struktural maupun fungsional sebanyak 114 orang dengan rincian sebagai berikut:

a. Berdasarkan jabatan struktural dan fungsional

1) Struktural

- Eselon III (IV.b) : 1 Orang
- Eselon IV (IV.a) : 4 Orang
- Eselon IV (III.d) : 6 Orang
- *Account Representative* (IV.a) : 1 Orang
- *Account Representative* (III.d) : 10 Orang
- *Account Representative* (III.c) : 13 Orang
- *Account Representative* (III.b) : 10 Orang
- *Account Representative* (III.a) : 3 Orang
- *Account Representative* (II. d) : 2 Orang
- *Account Representative* (II. c) : 1 Orang
- Pelaksana (IV.a) : 1 Orang
- Pelaksana (III.d) : 1 Orang
- Pelaksana (III.c) : 1 Orang
- Pelaksana (III.b) : 9 Orang
- Pelaksana (III.a) : 3 Orang
- Pelaksana (II.d) : 3 Orang
- Pelaksana (II.c) : 4 Orang
- Pelaksana (II.b) : 15 Orang
- Pelaksana (II.a) : - Orang

2) Fungsional

- Pemeriksa Pajak Madya (IV.c) : 1 Orang
- Pemeriksa Pajak Muda (IV.a) : 3 Orang
- Pemeriksa Pajak Muda (III.d) : 3 Orang
- Pemeriksa Pajak Muda (III.c) : 1 Orang
- Pemeriksa Pajak Pertama (III.b) : 3 Orang
- Penilai PBB Pelaksana (III.a) : - Orang
- Pemeriksa Pajak Pelaksana (III.a) : 6 orang
- Pemeriksa Pajak Pelaksana (II.d) : 3 Orang

3) Penyuluh

- Penyuluh Pajak Ahli Muda (III.d) : 1 Orang

- Penyuluh Pajak Ahli Pertama (III.b) : 1 Orang
- Asisten Penyuluh Pajak Mahir (III.b) : 1 Orang
- Asisten Penyuluh Pajak Mahir (III.a) : 1 Orang
- Asisten Penyuluh Pajak Terampil (II.d) : 2 Orang

b. Berdasarkan Formasi

- Pejabat Eselon III : 1 Orang
- Pejabat Eselon IV : 10 Orang
- Fungsional Pemeriksa Pajak : 20 Orang
- Penyuluh Pajak : 2 Orang
- Asisten Penyuluh Pajak : 4 Orang
- Pelaksana
 - Sekretaris : 1 Orang
 - Bendahara : 1 Orang
 - *Account Representative* (AR) : 40 Orang
 - Juru Sita : 2 Orang
 - Pelaksana lainnya : 33 Orang

c. Berdasarkan status kepegawaian:

- CPNS : 0 Orang
- PNS : 114 Orang
-

d. Berdasarkan tingkat pendidikan

- Strata 3 : - Orang
- Strata 2 : 14 Orang
- Strata 1/D IV : 56 Orang
- Sarjana Muda/Diploma III : 19 Orang
- Diploma II : - Orang
- Diploma I : 20 Orang
- SLTA atau yg sederajat : 5 Orang

e. Berdasarkan Pangkat

- Golongan IV berjumlah : 11 Orang
- Golongan III berjumlah : 73 Orang
- Golongan II berjumlah : 30 Orang

f. Berdasarkan jenis kelamin

- Laki-laki : 65 Orang
- Perempuan : 49 Orang

Sedangkan petugas Honorer yang ada di KPP Pratama Bandung Bandung Tegallega adalah:

- Petugas Satuan Pengamanan : 11 Orang
- Pengemudi Kendaraan Dinas Operasional : 2 Orang
- Pramubakti : 3 Orang
- *Cleaning Service* : 9 Orang.

1.1.3 Wilayah Kerja

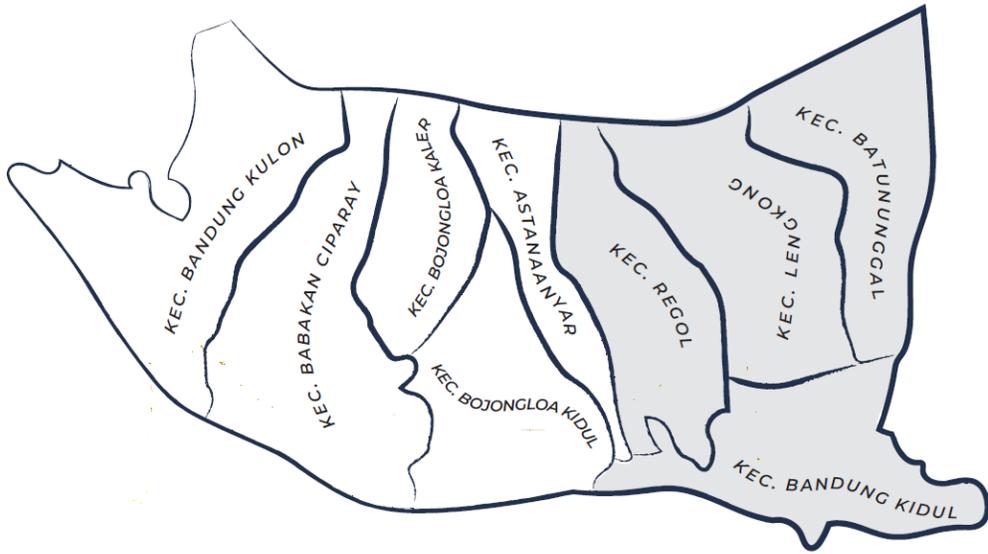
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega mempunyai wilayah kerja di Kota Bandung yang terdiri dari 9 Kecamatan dan 57 Kelurahan, dengan rincian sebagai berikut:

Wilayah Kerja	
Kecamatan	Kelurahan
Babakan Ciparay	Sukahaji
	Babakan
	Margahayu Utara
	Margasuka
	Babakan Ciparay
	Cirangrang
Bojongloa Kaler	Kopo
	Suka Asih

	Jamika
	Babakan Tarogong
	Babakan Asih
Bojongloa Kidul	Kebon Lega
	Situsaeur
	Cibaduyut
	Cibaduyut Kidul
	Cibaduyut Wetan
	Mekar Wangi
Astana Anyar	Cibadak
	Karang Anyar
	Karasak
	Pelindung Hewan
	Panjunan
	Nyengseret
Bandung Kulon	Gempol Sari
	Cigondewah Kaler
	Cigondewah Kidul
	Cigondewah Rahayu
	Caringin
	Cijerah
	Cibuntu
	Warung Muncang
Bandung Kidul	Wates
	Mengger
	Kujangsari
	Batununggal
Lengkong	Turangga
	Lingkar Selatan
	Malabar

	Cikawao
	Paledang
	Burangrang
	Cijagra
Regol	Pasirluyu
	Ciseureuh
	Ancol
	Cigereleng
	Balong Gede
	Pungkur
	Ciateul
Batununggal	Samoja
	Cibangkong
	Kacapiring
	Kebon waru
	Kebon Gedang
	Maleer
	Gumuruh
	Binong

Peta wilayah kerja KPP Pratama Bandung Tegallega :



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 ALUR PIKIR PERNYATAAN VISI, MISI, DAN PENJELASANNYA

Rencana Strategis merupakan serangkaian rencana tindakan/kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien, koordinatif serta disusun berdasar alur pikir sebagaimana bagan di atas. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega bertugas melaksanakan sebagian tugas operasional Direktorat Jenderal Pajak, berarti kantor menjadi penghimpun dana dari masyarakat Wajib Pajak. Dalam era modernisasi saat ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega harus berpandangan jauh ke depan, berupaya meningkatkan kualitas agar lebih professional, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Berkaitan dengan hal tersebut, setiap aparat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega harus didorong untuk lebih meningkatkan integritas dan kredibilitasnya, sehingga dapat dipercaya dan dibanggakan masyarakat secara professional dan efisien untuk mendukung tercapainya masyarakat adil dan makmur.

Dalam menjalankan tugas-tugasnya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega mengacu pada Visi Direktorat Jenderal Pajak sebagai berikut:

“Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan”.

Visi Direktorat Jenderal Pajak adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan Direktorat Jenderal Pajak yang dengan sungguh diinginkan untuk diinformasikan menjadi realita melalui komitmen dan tindakan oleh segenap jajaran Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam rangka pencapaian visi, Direktorat Jenderal Pajak memiliki misi, yaitu:

1. merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
2. meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan

3. mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

Sebagai wujud dukungan Direktorat Jenderal Pajak terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia, DJP menyiapkan perumusan regulasi yang selaras dan tidak tumpang tindih. Dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, upaya pelayanan yang berkualitas oleh DJP diwujudkan melalui alur layanan yang efektif, hemat waktu dan memberikan kepastian waktu penyelesaian. Selain itu, penerapan penegakan hukum yang adil baik bagi wajib pajak maupun bagi petugas diharapkan dapat ikut meningkatkan kepatuhan. DJP memastikan semua aspek dalam penyelenggaraan administrasi perpajakan didukung dengan teknologi, proses bisnis, organisasi dan sumber daya manusia yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

Keberadaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega dalam menjalankan fungsi operasional mengemban tugas menghimpun dana dari Sektor Pajak dan kegiatan lain yang harus dilakukan, seperti:

1. Perencanaan dan realisasi penerimaan pajak sesuai dengan perundang-undangan perpajakan dan aturan pelaksanaan lainnya.
2. Penerimaan dana dari Sektor Pajak dioptimalkan untuk melepaskan ketergantungan utang dan sepenuhnya untuk memenuhi harapan masyarakat dan pemerintah.
3. Mempertimbangkan *cost and benefit* dalam setiap kegiatan.

Pengaruh krisis global yang berkelanjutan lalu menyebar ke berbagai sektor ekonomi, serta berlanjut dengan krisis kepercayaan terhadap mata uang rupiah telah memberikan tekanan terhadap kinerja dan prospek ekonomi nasional. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan pengelolaan kebijaksanaan fiskal yang sehat, terpercaya, dan berkelanjutan, utamanya untuk memberikan perlindungan bagi kelompok masyarakat yang rentan terhadap dampak krisis dan dalam rangka pemulihan kondisi perekonomian nasional.

Oleh karena itu, pengelolaan kebijaksanaan fiskal diarahkan kepada upaya menstabilkan dan menggerakkan perekonomian, serta memberdayakan dan memberikan stimulasi kepada ekonomi rakyat. Berbagai upaya tersebut dilakukan harus terintegrasi, sinkron, dan bersinergi dengan berbagai kebijaksanaan di bidang-bidang lain (moneter, perdagangan luar negeri, neraca pembayaran, lalu lintas devisa, dan sektor riil), sehingga mampu menghantarkan bangsa Indonesia menuju masyarakat adil dan makmur.

Sebagai instansi pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait bidang perekonomian negara, kebijakan perpajakan merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi bangsa. Oleh karena itu, kebijakan perpajakan harus ditujukan pula untuk mendukung kebijakan ekonomi pemerintah baik secara umum maupun khusus. Dampak dari kebijakan perpajakan yang bisa mendistorsi perekonomian harus dihindari, sehingga kebijakan perpajakan tidak menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang.

Perkembangan kesadaran politik masyarakat telah mengarahkan bangsa Indonesia menuju proses demokratisasi di mana hak-hak masyarakat untuk menyuarakan pendapat atau keinginannya harus dihormati oleh pemerintah. Periode di mana pemerintah dapat memaksakan kehendaknya kepada masyarakat sudah berakhir, lalu digantikan dengan kewajiban pemerintah untuk mengakomodasikan dan melayani keinginan masyarakat. Dalam kondisi tersebut, Direktorat Jenderal Pajak juga memiliki kewajiban dan peranan untuk mendukung suksesnya proses demokratisasi. Salah satu keinginan penting masyarakat yang telah mendapat kesepakatan bersama pemerintah dan DPR.

2.2 FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN (*CRITICAL SUCCESS FACTORS*)

Critical Success Factors adalah faktor penentu keberhasilan yang mencakup berbagai bidang/aspek dari misi, yang sangat memengaruhi keberhasilan kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.

Adapun faktor-faktor penentu keberhasilan adalah:

1. Dukungan peraturan perpajakan;
2. Kepedulian masyarakat terhadap pajak;
3. Kepatuhan Wajib Pajak;
4. Kualitas Basis Data;
5. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);
6. Dukungan Teknologi Informasi;

2.3 TUJUAN

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada waktu tertentu, 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Hingga tahun 2025, tujuan dari Misi yaitu meningkatkan penerimaan pajak.

2.4 SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan, atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis. Sasaran harus bersifat spesifik, berorientasi pada hasil serta dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun masa mendatang.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega menetapkan sasaran, yaitu meningkatnya penerimaan pajak dalam rangka mengamankan target penerimaan.

2.5 CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

Dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menetapkan cara pencapaiannya melalui tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Menetapkan kebijaksanaan yang merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang (aspek legal) untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
2. Menyusun program-program strategis yang mendukung pencapaian visi dan misi;
3. Menyusun kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

2.5.1 Kebijaksanaan

Kebijaksanaan merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman dan pegangan bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai Sasaran, Tujuan, Misi dan Visi. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega memiliki kebijaksanaan, yaitu meningkatkan penerimaan pajak guna mengamankan target penerimaan. Target penerimaan pajak KPP Pratama Bandung Tegallega tahun 2024 sebesar Rp. 2.794.827.553.000,-.

2.5.2 Program

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna

mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Terdapat program yang ditetapkan untuk masing-masing kebijaksanaan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan penerimaan Pajak;
2. Intensifikasi penerimaan PPh, PPN, dan PPnBM;
3. Ekstensifikasi penerimaan PPh, PPN, dan PPnBM.

2.5.3 Rencana Kerja

Rencana kerja KPP Pratama Bandung Tegallea Tahun 2024 adalah sesuai dengan Renstra DJP 2021 - 2024. Kegiatan tersebut dilakukan dengan memaksimalkan kerja sumber daya yang ada guna mencapai tujuan dan sasaran dengan kebijaksanaan dan program yang telah ditentukan.

Kegiatan-kegiatan yang ditetapkan untuk masing-masing program adalah sebagai berikut:

- a. Intensifikasi penerimaan PPh, dengan kegiatan:
 - 1) Pemeriksaan PPh
 - 2) Penagihan PPh
- b. Ekstensifikasi penerimaan PPh, dengan kegiatan:
 - 1) Ekstensifikasi WP Orang Pribadi
 - 2) Ekstensifikasi WP Badan
- c. Intensifikasi penerimaan PPN, dengan kegiatan:
 - 1) Pemeriksaan PPN
 - 2) Penagihan PPN
- d. Ekstensifikasi penerimaan PPN, dengan kegiatan:
 - 1) Ekstensifikasi PKP PE
 - 2) Ekstensifikasi PKP Non PE

2.6 PENETAPAN KINERJA

Tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallea memiliki rencana kinerja tahunan yang dituangkan dalam 10 Sasaran Strategis dan 20 Indikator Kinerja. Dengan adanya indikator kinerja yang ditetapkan, hal tersebut menjadi tolak ukur keberhasilan organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Keberhasilan ditentukan dengan membandingkan realisasi dengan target. Berikut target kinerja KPP Pratama Bandung Tegallea pada tahun 2024:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	
		Persentase	Angka Mutlak
Stakeholder Perspective			
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal		
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	2.794.827.553.000
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	-
Customer Perspective			
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi		
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	2.590.128.992.000
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	-
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi		
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	204.698.561.000
Internal Process Perspective			
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif		
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	-
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00	-
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif		
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	-
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif		
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	-
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	-
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	-
7	Penegakan hukum yang efektif		
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	-

7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	-
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	-
8	Data dan informasi yang berkualitas		
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	-
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	-
<i>Learning & Growth Perspective</i>			
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif		
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	-
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	-
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	-
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel		
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	-

BAB III AKUNTABILITAS KERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
<i>Stakeholder Perspective</i>			
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal		
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,07 % (2.796.670.996.585)
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	99,28%
<i>Customer Perspective</i>			
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi		
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,03% (2.590.906.030.698)
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	100,77%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi		
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	204.698.561.000
<i>Internal Process Perspective</i>			
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif		
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	82,25%
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00	109,22%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif		
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	114,50%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif		
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	115,13%

6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	118,95%
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	112,77%
7	Penegakan hukum yang efektif		
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120%
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	87,76%
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	0%
8	Data dan informasi yang berkualitas		
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120%
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	71,17%
<i>Learning & Growth Perspective</i>			
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif		
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117,37%
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	95,82%
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	95,13%
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel		
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120%

3.1.1 Evaluasi dan Analisis Kinerja

1. Sasaran Strategis (SS) 1 : Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal

1) Indikator Kinerja Utama (IKU) 1a-CP: Persentase realisasi penerimaan pajak.

Dengan usaha keras yang dilakukan segenap pegawai KPP Pratama Bandung Tegallega, target penerimaan yang sebesar Rp. 2.794.827.553.000,- dapat dicapai sampai dengan Rp. 2.796.670.996.585,- atau tercapai 100,07%. Beberapa rencana aksi yang dilakukan KPP Pratama Bandung Tegallega untuk menghimpun penerimaan pajak ialah:

- Optimalisasi kegiatan pengawasan PPM dan PKM

- Optimalisasi Pengawasan perpajakan Instansi Pemerintah
- Optimalisasi tindak lanjut data dari internal dan eksternal
- Optimalisasi kegiatan bersama bedah WP Strategis
- Optimalisasi kualitas penggalan potensi perpajakan
- Optimalisasi kegiatan penagihan aktif
- Optimalisasi kegiatan pemeriksaan

2) Indikator Kinerja Utama (IKU) 1b-CP: Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

Dari target indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas sebesar 100,00%, KPP Pratama Bandung Tegallega berhasil merealisasikannya sebesar 99,28%.

2. Sasaran Strategis (SS) 2 : Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

1) Indikator Kinerja Utama (IKU) 2a-CP: Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

Target Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) sebesar 100,00% atau sebesar Rp 2.590.128.992.000,- KPP Pratama Bandung Tegallega berhasil merealisasikan sebesar Rp 2.590.906.030.698,- atau 100,03%. Berikut rencana aksi yang dilakukan:

- Meningkatkan pengawasan melalui penerbitan STP dan penerbitan SP2DK tahun berjalan
- Visit dan penguasaan wilayah kerja
- Melaksanakan koordinasi dengan bendahara instansi pemerintah daerah
- Melaksanakan penyuluhan kepada Wajib Pajak

2) Indikator Kinerja Utama (IKU) 2b-CP: Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi.

Target Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi sebesar 100% dari jumlah total Wajib Pajak yang wajib

melaporkan SPT, KPP Pratama Bandung Tegallega berhasil merealisasikannya sebesar 100,77%. Rencana aksi yang telah dilakukan dalam rangka merealisasikan IKU tersebut yaitu :

- Mengirimkan himbauan untuk menyampaikan SPT Tahunan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan melalui Whatsapp Blast
- Menyusun tim satuan petugas SPT Tahunan 2025
- Melakukan asistensi penyampaian SPT Tahunan
- Menghimbau kepada pemberi kerja untuk menerbitkan Bukti Potong PPh Ps 21 (A1 dan A2)
- Membuka Pojok Pajak pada tempat-tempat strategis

3. Sasaran Strategis (SS) 3 : Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi

1) Indikator Kinerja Utama (IKU) 3a-CP: Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM sebesar Rp. 204.698.561.009,-, KPP Pratama Bandung Tegallega dapat merealisasikan sebesar Rp. 205.754.435.884,- atau dalam bentuk persentase sebesar 100,52%. IKU persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM didapat dari kegiatan *extra effort* pengawasan, penagihan dan pemeriksaan. Penerimaan pajak dari PKM pengawasan telah memenuhi target yang diberikan namun untuk penerimaan pajak dari PKM penagihan dan pemeriksaan belum memenuhi target. Hal ini lah yang mengakibatkan realisasi IKU tidak dapat terealisasi 100%. Berikut rencana aksi yang dilakukan oleh KPP Pratama Bandung Tegallega:

Kegiatan Pengawasan :

- Menguji validitas data melalui klarifikasi dengan WP
- Melakukan percepatan penyelesaian SP2DK Outstanding
- Melakukan sharing session antara seluruh Seksi Pengawasan dengan Fungsional Pemeriksa Pajak terkait penggalian potensi WP

Kegiatan Pemeriksaan dan Penagihan :

- Meningkatkan tindakan penagihan aktif
- Percepatan penyelesaian pemeriksaan
- Mengoptimalkan Penagihan terhadap Wajib Pajak non DSPC
- Mengingatkan Wajib Pajak dalam hal pelunasan/pembayaran atas SKP yang telah disepakati

4. Sasaran Strategis (SS) 4: Edukasi dan pelayanan yang efektif

1) Indikator Kinerja Utama (IKU) 4a-CP: Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan.

Dari target sebesar 74,00%, KPP Pratama Bandung Tegallega berhasil merealisasikannya sebesar 82,25%. Berikut rencana aksi yang dilakukan oleh KPP Pratama Bandung Tegallega:

- Melaksanakan edukasi dan penyuluhan secara daring dan luring kepada Wajib Pajak tertentu
- Meningkatkan kegiatan edukasi one on one dan one to many
- Melaksanakan pojok pajak di kecamatan-kecamatan dan instansi vertikal/pemerintah daerah
- Melaksanakan sosialisasi mengenai peraturan perpajakan
- Sosialisasi mengenai sistem administrasi perpajakan baru (Coretax)
- Kolaborasi antara Seksi Pengawasan dengan Penyuluh Pajak mengenai perubahan perilaku bayar WP

2) Indikator Kinerja Utama (IKU) 4b-N: Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan

Dari target Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan sebesar 100% KPP Pratama Bandung Tegallega berhasil merealisasikannya sebesar 109,22. Berikut adalah rencana aksi yang dilakukan oleh KPP Pratama Bandung Tegallega :

- Melaksanakan evaluasi pelayanan
- Menindaklanjuti hasil survei
- Meningkatkan kualitas pelayanan serta sarana dan prasarana

5. Sasaran Strategis (SS) 5: Pengawasan pembayaran masa yang efektif

1) Indikator Kinerja Utama (IKU) 5a-CP: Persentase pengawasan pembayaran masa.

Dari target persentase pengawasan pembayaran masa sebesar 90,00%, KPP Pratama Bandung Tegallega berhasil merealisasikannya sebesar 114,50%. Upaya – upaya yang dilakukan untuk dapat mencapai target IKU tersebut ialah dilakukannya optimalisasi penerbitan STP, optimalisasi kegiatan ekstensifikasi, dan optimalisasi kegiatan penelitian Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25.

6. Sasaran Strategis (SS) 6: Pengujian kepatuhan material yang efektif

1) Indikator Kinerja Utama (IKU) 6a-CP: Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan.

Dari target sebesar 100,00%, KPP Pratama Bandung Tegallega berhasil merealisasikannya sebesar 115,13%.

2) Indikator Kinerja Utama (IKU) 6b-N: Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan.

Dari target sebesar 100,00%, KPP Pratama Bandung Tegallega berhasil merealisasikannya sebesar 118,95%.

3) Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu.

Dari target sebesar 100% KPP Pratama Bandung Tegallega berhasil merealisasikan sebesar 112,77%.

7. Sasaran Strategis (SS) 7: Penegakan hukum yang efektif

1) Indikator Kinerja Utama (IKU) 7a-CP: Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian.

Dengan melakukan peningkatan pemanfaatan dan analisis data serta memaksimalkan kegiatan pemeriksaan dan penilaian KPP Pratama Bandung Tegallega berhasil merealisasikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat Efektivitas Pemeriksaan sebesar 120% dari target sebesar 100%.

2) Indikator Kinerja Utama (IKU) 7b-CP: Tingkat efektivitas penagihan.

Dengan memaksimalkan kegiatan tindakan penagihan aktif serta menyusun Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) KPP Pratama Bandung Tegallega dapat merealisasikan IKU Tingkat Efektivitas Penagihan sebesar 87,76% dari target sebesar 75,00%.

3) Indikator Kinerja Utama (IKU) 7c-N: Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Dikarenakan belum adanya Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan dari KPP Pratama Tarakan yang disetujui sehingga KPP Pratama Bandung Tegallega belum merealisasikan target tersebut.

8. Sasaran Strategis (SS) 8 : Data dan Informasi yang berkualitas

1) Indikator Kinerja Utama (IKU) 8a-CP: Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan.

IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan dapat terealisasikan oleh KPP Pratama Bandung Tegallega sebesar 117,37% dari target 100,00%.

2) Indikator Kinerja Utama (IKU) 8b-CP: Persentase penghimpunan data regional dari ILAP.

Dari target sebesar 55,00%, KPP Pratama Bandung Tegallega berhasil merealisasikannya sebesar 71,17% Berikut rencana aksi yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Bandung Tegallega:

- Berkoordinasi dengan Kanwil dan KPP di Kota Bandung
- Berkoordinasi dengan dinas yang diampu oleh KPP

9. Sasaran Strategis (SS) 9 : Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

1) Indikator Kinerja Utama (IKU) 9a-N: Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi.

Target persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi sebesar 100%, KPP Pratama Bandung Tegallega berhasil merealisasikan sebesar 117,37%.

2) Indikator Kinerja Utama (IKU) 9b-N: Indeks Penilaian Integritas Unit

Target indeks penilaian integritas unit sebesar 85% berhasil direalisasikan KPP Pratama Bandung Tegallega sebesar 95,82%

3) Indikator Kinerja Utama (IKU) 9c-N: Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

Target indeks penilaian integritas unit sebesar 90% berhasil direalisasikan KPP Pratama Bandung Tegallega sebesar 95,13%

10. Sasaran Strategis (SS) 10 : Pengelolaan keuangan yang akuntabel

1) Indikator Kinerja Utama (IKU) 10a-CP: Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

Dari target sebesar 100, KPP Pratama Bandung Tegallega berhasil merealisasikannya sebesar 120.

3.2 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan perkantoran, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega memperoleh dana berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BA 15 sebesar Rp. 6,856,735,000,- (Enam Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51 5111 511129	BELANJA PEGAWAI Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Belanja Uang Makan PNS	1,097,280,000	894,587,000	888,748,000	0	888,748,000	99.35	5,839,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	1,097,280,000	894,587,000	888,748,000	0	888,748,000	99,35	5,839,000
5122 512211	Belanja Lembur Belanja Uang Lembur	77,152,000	49,821,000	49,820,000	0	49,820,000	100	1,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	77,152,000	49,821,000	49,820,000	0	49,820,000	100	1,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	1,174,432,000	944,408,000	938,568,000	0	938,568,000	99,38	5,840,000
52 5211 521111 521114 521115 521119	BELANJA BARANG Belanja Barang Operasional Belanja Keperluan Perkantoran Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat Belanja Honor Operasional Satuan Kerja Belanja Barang Operasional Lainnya	1,588,311,000 501,990,000 80,352,000 0	1,722,823,000 206,219,000 66,048,000 6,001,000	1,722,646,438 206,218,487 66,048,000 6,000,000	0 52,000 0 0	1,722,646,438 206,166,487 66,048,000 6,000,000	99.99 99.97 100 99.98	176,562 52,513 0 1,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	2,170,653,000	2,001,091,000	2,000,912,925	52,000	2,000,860,925	99,99	230,075

5212	Belanja Barang Non	204,000,000	374,224,000	374,133,244	0	374,133,244	99.98	90,756
521211	Operasional	295,462,000	614,197,000	609,763,764	0	609,763,764	99.28	4,433,236
521219	Belanja Bahan	0	44,400,000	44,400,000	0	44,400,000	100	0
521252	Belanja Barang Non Operasional Lainnya							
	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel							
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	499,462,000	1,032,821,000	1,028,297,008	0	1,028,297,008	99.56	4,523,992
5218	Belanja Barang Persediaan	540,000,000	556,789,000	556,739,567	0	556,739,567	99.99	49,433
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi							
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	540,000,000	556,789,000	556,739,567	0	556,739,567	99.99	49,433
5221	Belanja Jasa	348,000,000	333,457,000	333,456,295	0	333,456,295	100	705
522111	Belanja Langganan Listrik	48,000,000	32,981,000	32,980,957	0	32,980,957	100	43
522112	Belanja Langganan Telepon	357,045,000	285,101,000	285,099,121	0	285,099,121	100	1,879
522141	Belanja Sewa	18,600,000	16,501,000	16,192,306	0	16,192,306	98.13	308,694
522151	Belanja Jasa Profesi	49,321,000	9,991,000	9,990,000	0	9,990,000	99.99	1,000
522191	Belanja Jasa Lainnya							
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	820,966,000	678,031,000	677,718,679	0	677,718,679	99.95	312,321
5231	Belanja Pemeliharaan	325,000,000	560,050,000	559,752,969	0	559,752,969	99.95	297,031
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	365,750,000	379,581,000	378,467,997	0	378,467,997	99.71	1,113,003
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin							
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3,000,000	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	693,750,000	945,631,000	944,220,966	0	944,220,966	99.85	1,410,034
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	780,798,000	278,383,000	275,587,550	1,024,200	274,563,350	98.63	3,819,650
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	356,850,000	215,752,000	215,700,000	0	215,700,000	99.98	52,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	4,285,000	2,880,200	0	2,880,200	67.22	1,404,800
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota							
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	1,137,648,000	498,420,000	494,167,750	1,024,200	493,143,550	98.94	5,276,450
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	5,862,479,000	5,712,783,000	5,702,056,895	1,076,200	5,700,980,695	99.79	11,802,305
53	BELANJA MODAL	0	199,544,000	199,374,870	0	199,374,870	99.92	169,130
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	0	199,544,000	199,374,870	0	199,374,870	99.92	169,130
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	0	199,544,000	199,374,870	0	199,374,870	99.92	169,130
	JUMLAH BELANJA	7,036,911,000	6,856,735,000	6,839,999,765	1,076,200	6,838,923,565	99.74	17,811,435

BAB IV PENUTUP

Seluruh materi yang tersaji dalam Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega merupakan perpaduan antara sebuah komitmen dan tanggungjawab dari sebuah institusi pemerintah kepada semua pihak. Komitmen dan tanggungjawab tersebut tidak saja diwujudkan dalam ukuran-ukuran yang bersifat kuantitatif seperti pemenuhan target penerimaan, namun lebih penting adalah sejauh mana institusi tersebut bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat didalamnya.

Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega tahun 2024 yang disajikan dalam bentuk LAKIN sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review Atas Laporan Kinerja (Permenpan Nomor 53/2014), yang analisisnya pada saat ini hanya sampai pada hal-hal yang bersifat kuantitatif berupa input, output, dan outcome. Hal ini mengandung maksud bahwa kegiatan yang dilakukan bukan hanya memproduksi keluaran (output) semata, tetapi keluaran dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan telah sampai pada hasil yang diinginkan walaupun hasil ini masih merupakan langkah awal bagi langkah-langkah analisis berikutnya yaitu analisis dampak dan manfaat .

Capain kinerja organisasi KPP Pratama Bandung Tegallega pada tahun 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2023. Walaupun mengalami penurunan, nilai capaian kinerja organisasi KPP Pratama Bandung Tegallega tahun 2024 masih melebihi 100%. Penurunan tersebut disebabkan oleh dua Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tidak memenuhi target, yaitu IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan dan IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas.

Dengan disusunnya LAKIN ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan baik kepada pimpinan Direktorat Jenderal Pajak maupun kepada semua pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi KPP Pratama Bandung Tegallega, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Dadang Karna Permana

